

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMAHAMAN REGULASI STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

THE INFLUENCE OF QUALITY OF HUMAN RESOURCES, TUNDERSTANDING OF ACCRUAL BASED ACCOUNTING REGULATIONS, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL MANAGEMENT FINANCIAL SYSTEM TOWARD THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING

¹Ismi Desintha Putri, ²Sri Rahayu, ³Annisa Nurbaiti

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

e-mail: ismidesintha@gmail.com, srirahayu@telkomuniversity.ac.id, annisanurbaiti@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Kota Bandung merupakan kota yang cukup besar keuangar tetapi sampai tahun 2015 belum juga mendapatkan opini WTP ini berarti kualitas laporan masih belum mencapai yg ditargetkan, hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang factor yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kota Bandung .

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada PPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh, dimana semua populasi dijadikan sample yakni sebanyak 45 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, system pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan oleh variabel-variabel bebas (R^2) sebesar 95,6%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik yaitu disarankan agar pegawai meningkatkan pemahaman akan tugasnya dan meningkatkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan Serta dalam penerapan sitem majemen keuangan daerah diharapkan agar BPKA dapat memperkecil kesalahan pencatatan dan kesalahan dalam perhitungan pada sistem agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Kata Kunci : SDM, SAP, SPI, SIMDA

Abstract

Financial Statements are prepared to provide relevant information about the financial position and all transactions conducted by a reporting entity during the reporting period. The financial statements of the government has a goal present useful information for making a decision. Bandung is a fairly large city until 2015 keuangar but not also get WTP opinion this means the quality of the report has yet to reach that target, it is necessary to do research on the factors that will improve the quality of financial reports in Bandung.

This study was conducted to determine the effect of the quality of human resources, understanding the regulation of accrual-based government accounting, internal control systems and financial management systems local to the quality of the financial statements of both the effect of partially or simultaneously.

This study was a descriptive study and the nature of causality. The population in this study were employees of accounting / financial PPKD Finance and Asset Management Agency of Bandung. Sampling technique using saturation sampling method, where all populations sampled that as many as 45 people. The data used in

this study were analyzed using multiple linear regression analysis and hypothesis testing, and preceded with the classical assumption.

The results showed that simultaneous quality of human resources, understanding the regulation of accrual-based government accounting standards, internal control system and the implementation of local financial management systems affect the quality of financial reporting. Partially quality of human resources has no effect on the quality of financial statements, whereas the understanding of the regulation of accrual-based government accounting standards, internal control system and financial management system has an influence area have an influence on the quality of financial reporting. Based on contributions simultaneous testing by the independent variables (R²) of 95.6%.

Based on the research results, to improve the quality of financial reports are good, that suggested that employees increase understanding of its work and improve its ability to adapt to change well as in the application system majemen local finance is expected to be BPKA can minimize recording errors and errors in the calculation of the system so that the quality of reporting the resulting financial increases.

Keywords: *human resources, SAP, SPI, SIMDA*

1. Pendahuluan

Reformasi Keuangan Negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pemerintahan pusat maupun daerah khususnya pada pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan sangat penting bagi pemerintah agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksanaannya atau Sumber Daya Manusianya (SDM). Didalam pemerintahan, SDM atau kepegawaian PNS diatur dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai. Dari hasil penelitian (Basukianto, 2015) meskipun pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi hasil menunjukkan bahwa 105 responden (74,47%) menyatakan bahwa jumlah pegawai/staf yang berlatar belakang akuntansi belum memadai, dan hanya 36 responden (25,53%) sudah cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa yang berlatar belakang akuntansi masih rendah. Menurut hasil penelitian Rama mahaputra [17], Basukianto [1] menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Adapun Hasil temuan yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya yaitu penelitian indrisari [8] dan Zuliarti [23] menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap keandalan laporan keuangan.

Dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik tentunya SDM harus memahami regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas tersebut rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya

adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). Mardiasmo mengatakan implementasi ini harus sudah dijalankan agar tidak lupa dengan amanat Undang-Undang tersebut. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah. "Kompetensi standar untuk SDM sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah di luncurkan, sosialisasi juga sudah dilakukan agar SDM mampu memahami tentang SAP berbasis akrual ." Masing-masing kementerian dan lembaga juga ditunjuk Duta Akrual yang diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Nantinya akuntansi berbasis akrual ini juga akan diterapkan ke pemerintah daerah. Walaupun semuanya sudah dijalankan dalam persiapan standar akuntansi berbasis akrual tetapi opini yang diberikan BPK kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2015 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat masih rendah Mardiasmo [10] Dari hasil uji penelitian Kiranayanti [9] Variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah sistem pengendalian internalnya. Dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) peraturan ini mengadopsi model Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Menurut COSO sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan didalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya Adapun kerangka SPIP dalam PP 60/2008 antara lain, Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Walaupun banyak provinsi atau kota/kabupaten yang memiliki kualitas laporan keuangan baik dan mendapat opini WTP tetapi belum tentu memiliki pengendalian internal yang baik, bahwa WTP tidak menjamin tidak ada korupsi di lembaga yang memperoleh opini demikian. WTP menjadi obsesi pimpinan lembaga, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sampai melayangkan kritik, WTP seolah menjadi ajang pameran pimpinan lembaga pusat dan daerah. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaan beropini WTP. Seperti kasus dua orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yang divonis masing-masing empat tahun penjara karena menerima suap ratusan juta dari pejabat Pemerintah kota Bekasi. Uang suap itu diberikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi memuat WTP.

Selain SDM setiap instansi pasti membutuhkan teknologi informasi yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)/ Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDA) yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan akurat, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. SIMDA Keuangan sudah digunakan lebih dari 400 pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan, sekarang dengan berlakunya akuntansi pemerintahan berbasis akrual basis, pemda yang menggunakan SIMDA Keuangan akrual basis sudah hampir mencapai 500 pemda. Walaupun Provinsi Kalimantan timur mendapat opini WTP tetapi dalam penerapan SIMDA masing masing SKPD belum sepenuhnya terintegritas dikarenakan masih ada permasalahan dan kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut Maulidyah "selama ini dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam permasalahan dan kendala. Seperti belum terintegrasinya SIMDA pendapatan ke SIMDA keuangan yang mengakibatkan operator harus menginput kembali ke SIMDA keuangan". Menurut hasil penelitian Dewi [2] penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. berbeda dengan hasil penelitian Sahaan [20] Sistem Manajemen Akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Werther dan Davis sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya. trihapsoro [21] kualitas SDM diukur melalui ketersediaan SDM yang kompeten, pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan Fuad [5].

Pemahaman atas Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur

terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Pemahaman akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel Tickell [22]

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 yang dikutip oleh Manaf [11] dalam mengukur Pemahaman tentang SAP yaitu dengan memahami penyajian, komponen, pengakuan laporan keuangan serta kesalahan koreksi dalam pencatatan.

Sistem Pengendalian Internal

Definisi pengendalian intern menurut Romney [18] dalam bukunya yang berjudul *Accounting Information Systems* adalah suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh dewan komisaris atau manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai sehingga dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan pengendalian tersebut antara lain perlindungan aktiva, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

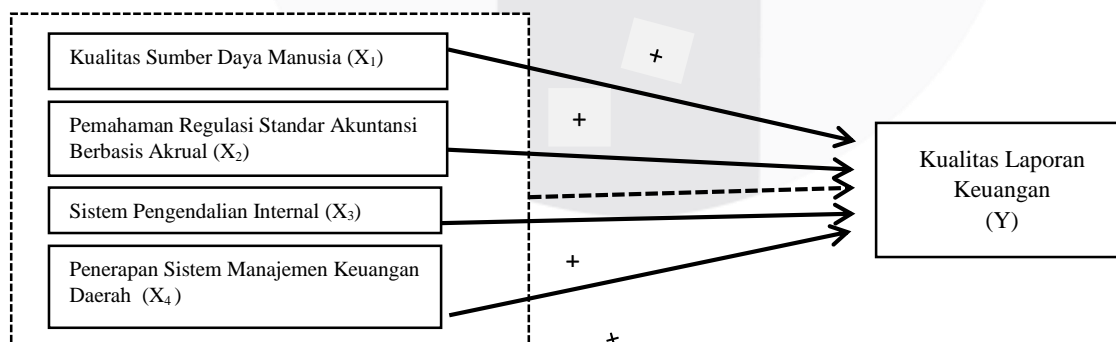
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah no 56 tahun 2005 sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah / Sistem Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Aplikasi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Untuk itu pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah Peraturan. Aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi yaitu indikator keamanan data, indikator waktu, indikator ketelitian, indikator variasi laporan atau output, dan indikator relevansi.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Hanafi [6] Laporan Keuangan Perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. Sedangkan menurut Sadeli [19] Pengertian Laporan Keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami



Keterangan

-----> : Secara simultan

————> : Secara parsial

Gambar 1.1 Kerangka

Sumber daya manusia tinggi, maka Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik. Jika Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua dalam instansi juga tinggi, maka Kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik. Jika Sistem Pengendalian internalnya baik, maka Kualitas Laporan Keuangan pun akan semakin baik dan jika penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah baik maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan baik pula. Sehingga secara simultan atau bersama-sama, jika Kualitas Sumber daya manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah, maka akan berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan yang semakin baik.

Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai ppkd badan pengelolaan keuangan dan asset daerah bidang akuntansi/keuangan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh* dengan total sampel 45 responden yang terdiri atas seluruh bagian Akuntansi/keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.

3. Pembahasan

Sebelum melakukan analisis statistik deskriptif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas atas seluruh pernyataan yang ada didalam kuesioner untuk mengetahui apakah pernyataan yang digunakan telah valid dan reliabel untuk diuji. Setelah itu, barulah dilakukan analisis statistik deskriptif yang hasilnya terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Hasil Statistik Deskriptif

Rata-rata					
Variabel	SS	S	R	TS	STS
Kualitas Sumber Daya Manusia	10	30	4	0	0
Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua	4	27	10	0	0
Sistem Pengendalian internal	4	27	14	0	0
Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah	6	11	7	0	0
Kualitas Laporan Keuangan	5	32	8	0	0

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23 (2017)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia yang meliputi tanggungjawab yang diberikan, latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya dan kemampuan dalam beradaptasi; Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua meliputi pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan, penyajian dalam laporan keuangan berbasis akrua, pengakuan dalam akuntansi berbasis akrua, komponen laporan keuangan serta kesalahan atas koreksi; Sistem Pengendalian Internal yang meliputi, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan; Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah yang meliputi keamanan data, waktu, ketelitian variasi laporan dan relevansi dan Kualitas Laporan Keuangan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami rata-rata mayoritas responden menjawab setuju, artinya setiap pernyataan dalam kuisisioner telah sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan yang sebenarnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung semua variabel telah berada dalam kategori tinggi atau baik.

Berdasarkan uji validitas dan uji reliabel, seluruh pernyataan dalam indikator Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan valid yakni r_{hitung} yang diperoleh dari masing-masing variabel lebih dari r_{tabel} yakni sebesar 0,294 dan dinyatakan reliabel karena dari hasil yang diperoleh menunjukkan lebih dari $crochba$ alfa yakni 0,60

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni normalitas kelima variabel tersebut telah berdistribusi normal yakni sebesar 0,057 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, berdasarkan uji multikolonieritas menunjukkan kelima variabel tersebut memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolonieritas antar variabel, berdasarkan uji heteroskedostisitas pola yang dihasilkan menyebar baik di bawah angka 0 maupun sumbu Y ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedostisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda seperti tabel berikut :

Tabel 1.2 Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	0,106	10,812	0,000
Kualitas Sumber daya manusia	-0,49	-1,154	0,255
Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua	0,953	13,399	0,000
Sistem Pengendalian Internal	-0,86	21,172	0,036
Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah	-0,165	-3121	0,003
Fhitung = 33,334			
Sig = 0,000			
R ² = 0,427			

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 23.0 (2017)

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas sumber daya manusia (X1), pemahaman regulasi standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrua (X2), sistem pengendalian internal (X3) dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah (X4) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) pada pemerintah kota bandung, artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia yang meliputi tanggung jawab yang diberikan, latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman tentang tugasnya, kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan ; pemahaman regulasi standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrua yang meliputi pemahaman atas peraturan, prosedur, kebijakan tentang peraturan daerah, penyajian dalam laporan keuangan berbasis akrua, pengakuan dalam akuntansi berbasis akrua, dan kesalahan atas koreksi ; sistem pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian , aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan ; penerapan system manajemen keuangan daerah meliputi indikator keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan relevansi maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintahan kota bandung. Kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 95,6% terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Evicahyani [3] menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,255 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,255 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kota Bandung, artinya semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia maka belum tentu akan mempengaruhi rendahnya kualitas laporan keuangan begitupun sebaliknya. Berdasarkan statistik deskriptif untuk indikator kualitas sumber daya manusia memiliki rata-rata yang tinggi atau memadai. jika dibandingkan tiap indikatornya pemahaman tentang tugasnya dan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan memiliki persentasi yang paling rendah yaitu sebesar 78,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti [23] Harzita [7] bahwa kualitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis kedua yaitu variabel Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Sehingga, H_0 ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X2) berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin baik pemahaman regulasi standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrua semakin baik juga Kualitas Laporan Keuangan di Kota Bandung. Pengaruh pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yaitu sebesar 77 %. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kiranayanti dan Earawati [9], Evicahyani dan Setiawina [3] yang menunjukan bahwa Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis ketiga yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,036 < 0,05$. Sehingga, H_0 ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Pengendalian Internal (X3) berpengaruh Signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin tinggi system pengendalian internalnya maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Pengaruh system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yaitu sebesar 75 %. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah [12] Zuliarti [23], Basukianto (2015) Fadilah [1], Kiranayanti dan [9] Evicahyani dan Setiawina[3] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengaruh Penerapan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14, untuk hipotesis keempat yaitu variabel Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (X4) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,003 < 0,05$. Sehingga, H_1 ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Sistem Manajemen keuangan daerah (X4) berpengaruh dengan arah yang negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin penerapan sistem manajemen keuangan rendah maka kualitas laporan keuangan akan meningkat. Berdasarkan statistik deskriptif indikator penerapan sistem manajemen keuangan memiliki rata-rata yang tinggi atau memadai yakni sebesar 79,7. jika dibandingkan tiap indikatornya kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan memiliki persentasi yang paling rendah yaitu sebesar 75,1. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Mimda[2] menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)/sistem manajemen keuangan daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan rata-rata mayoritas responden memilih setuju, Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut berada dalam kategori tinggi atau baik.

Berdasarkan hasil uji simultan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan secara parsial Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kualitas sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka:

- [1] Basukianto, F. C. (2015). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) ISSN: 1412-3126
- [2] Dewi, P. R., & Mimba, N. S. (2014). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Pada Kualitas Laporan Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556
- [3] Evicahyani, Sagung Intend an Setiawina Nyoman Djinar (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan*. ISSN : 2337-3067
- [4] Edy Sutrisno (2009), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media.
- [5] Fuad, Muhammad Indra Yudha Kusuma. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua pada Pemerintah*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2, No. 3, Hlm. 1.
- [6] Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [7] Hazrita, Fadilah dkk. (2013). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau*. Jurnal SOROT. Vol. 9 No.1 Hal 59-69.
- [8] Indrisari, Desi, & Nahartyo, E. (2008). *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintahan pontianak*. SNA XI Pontianak.
- [9] Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. A. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2.

- [10]Mardiasmo.(2015:35).neraca.co.id.<http://www.neraca.co.id/article/51281/pemerintah-terapkan-akuntansi-berbasis-akrual> (19 september 2016)
- [11] Manaf, Iqlima A dkk. (2014). *Pengaruh Pemahaman Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PadaInspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh* . Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164
- [12] Nurillah, As Syifa (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*. Diponegoro Journal of Accounting Volume 3 Nomor 2 tahun 2014, ISSN (Online): 2337-3806
- [13] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- [14] Peraturan Pemerintah no 56 tahun 2005 sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah / Sistem Manajemen Keuangan Daerah
- [15] Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- [16] Rahayuningsih, A., & Subadriyah. (2015). *Analisis Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. The 2nd University Research Coloquium 2015. ISSN 2407-9189
- [17] Rama Mahaputra, I. p., & Putra, I. W. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Akuntansi Universitas Udayana.
- [18] Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2012. Twelfth Edition. *Accounting Information Systems*. United States of America: Pearson Education Limited.
- [19] Sadeli, Prof. Drs. H. Lili. M.Pd.2014.*Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- [20] Siahaan, m. g., & fachruzamman. (2013). *Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan: Pemerintah kota tanggerang*.
- [21]Trihapsoro, Argo (2015), *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [22] Tickell, G. (2010). *Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma*. Internatinal Business & Economics research journal, Vol 09 No 11, 71-78.
- [23] Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Kudus.